

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan guna mencetak sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia yang kemudian menunjang pembangunan diberbagai sektor akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut. Pembangunan manusia merupakan hal yang penting terutama bagi sebagian negara yang sedang berkembang hal ini disebabkan oleh karena banyak banyak negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun gagal dalam menghadapi kesenjangan sosial dan meningkatnya kemiskinan selain itu pembangunan manusia sebenarnya merupakan investasi tidak langsung terhadap pencapaian tujuan perekonomian nasional.

2. Pengertian Pembangunan Manusia

Definisi Indeks Pembangunan Manusia menurut UNDP (United Nation Development Program) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan

bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjasi paradigma tersebut.

Pemerintah dalam hal ini merupakan fasilitator bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih luas. Gambaran yang dapat diambil guna melihat seberapa jauh peran pemerintah untuk menjadi fasilitator dari Pembangunan Manusia adalah melalui kebijaksanaan pengeluaran pemerintah yang diambil. Salah satu yang paling menentukan dalam suksesnya Pembangunan Manusia adalah pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan, sehingga dua sektor tersebut menjadi menjadi prioritas bagi pemerintah guna mewujudkan Pembanguna Manusia yang pada akhirnya menjadi input dalam prose pembangunan di berbagai sektor.

Besarnya pengeluaran pemerintah merupakan indikasi dari komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Pengeluaran Rumah Tangga juga merupakan faktor yang menentukan lancarnya Pembangunan Manusia. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggota keluarga, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lain yang serupa. Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga hubungan antara kedua variabel tersebut berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena penciptaan lapangan kerja merupakan “jembatan utama” yang mengaitkan keduanya (UNDP, 1996).

Dalam pembangunan manusia terdapat hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian utama (UNDP, 1995), yaitu :

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbears pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan pada hanya aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu : produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

5. Pembangunan manusia menjadi dasar penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu diperhatikan lebih lanjut pilar pokok yang mendukung pembangunan manusia, dijabarkan lebih lanjut UNDP (1995), empat pilar pokok yang mendukung pembangunan manusia tersebut adalah :

1. Produktivitas. Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.
2. Pemerataan. Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kestinambungan. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.
4. Pemberdayaan. Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Pembangunan manusia pada hakikatnya adalah memperluas pilihan bagi masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pembangunan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek lain yaitu selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik, budaya serta aspek lainnya untuk menjadikan manusia lebih produktif dalam berkegiatan. Dengan demikian paradigma pembangunan mencakup dua sisi yaitu : berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik.

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Indek Pembangunan Manusia ini merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan *Gross Domestik Bruto*. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah tersebut itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tampa kecuali), dantingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan sumber daya manusia.Dengan tingkat pendidikan yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah indikator untuk mengukur kualitas (dereajat perkembangan manusia) dari hasil pembangunan ekonomi. Human Development Index diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990. IPM menggunakan ukuran sosial-ekonomi yang lebih komprehensif dari pada GNP dan memungkinkan untuk membandingkan negara dengan cara yang berbeda. Perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya :

- a) Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b) Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c) Membentuk suatu indek komposita dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d) Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang disunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia sautu negara, yaitu :

1. Tingkat kesehatan diukur dengan harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan jumlah penduduk yang melek huru atau tingkat pendidikan seorang penduduk.

3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita pertahun.

Rumusan umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3) \dots \dots \dots (1)$$

Di mana :

X_1 = Indeks Harapan Hidup

X_2 = Indeks Pendidikan

X_3 = Indeks Standart Hidup Layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut :

$$IPM = \sum_{i=1}^3 I_i : I_i = \frac{X_i - \text{Min } X_i}{\text{Max } X_i - \text{Min } X_i} \dots \dots \dots (2)$$

Di mana :

I_i = Indeks komponen IPM ke i di mana $I = 1,2,3$

X_i = Nilai indikator komponen IPM ke i

$\text{Max } X_i$ = Nilai maksimum X_i

$\text{Min } X_i$ = Nilai minimum X_i

4. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

4.1 Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel e_0 diharapkan

akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses perhitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpark. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

4.2 Indeks Pendidikan

Perhitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

4.3 Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan *real per kapita GDP adjusted*. Untuk menghitung IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP dengan tahapan sebagai berikut (berdasarkan ketentuan UNDP) :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per tahun untuk 27 komoditi dari SUSENAS Kor yang telah disesuaikan (A).
- b. Menghitung nilai pengeluaran riil (B) yaitu dengan membagi rata-rata pengeluaran (A) dengan IHK tahun yang bersangkutan.
- c. Agar indikator yang diperoleh nantinya dapat menjamin keterbandingan antar daerah, diperlukan indeks “Kemahalan” wilayah yang biasa disebut dengan daya beli per unit (PPP/Unit). Metode perhitungannya disesuaikan dengan metode yang dipakai *International Comparison Project (ICP)* dalam menstandarkan GNP per kapita suatu negara. Data yang digunakan adalah data kuantum per kapita per tahun dari suatu basket komoditi yang terdiri dari 27 komoditi yang diperoleh dari SUSENAS Modul sesuai

dengan ketetapan UNDP (Tabel 6). Perhitungan PPP/unit dilaksanakan dengan rumus :

$$PPP/Unit = Ri \frac{\sum_{j=1}^{27} E (ij)}{\sum_{j=1}^{27} P(ij)Q(ij)} \dots\dots\dots(3)$$

Di mana :

E (i,j) = Pengeluaran untuk komoditi j di Provinsi i

P (i,j) = Harga komoditi j di Provinsi i

Q (i,j) = Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Provinsi i

5. Konsep Pembangunan Manusia

Beberapa kalimat pembuka dari Human Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh United Development program (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan manusia baik di tingkat global, nasional maupun di tingkat daerah, yaitu pembangunan manusia yang terpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan nasional dan bukan sebagai alat pembangunan.

“People are the real wealth of nation. The basic objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy, and creative lives. This may appear to be a simple truth. But it is often forgotten in the immediate concern with the accumulation of commodities an financial wealth.”

Berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan

konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan (UNDP, 2004).

Tabel 2.1
Keterkaitan Millenium Development Goals dengan Pembangunan

<i>Indikator Pembangunan Manusia</i>	<i>Millenium Development Goals</i>
Hidup yang sehat dan usia yang panjang	Tujuan : menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan menangani penyakit utama.
Pendidikan yang memadai	Tujuan : menuntaskan pendidikan dasar, kesetaraan gender dalam pendidikan, dan memberdayakan wanita.
Standar hidup yang layak	Tujuan : mengurangi kemiskinan dan kelaparan

Sumber : UNDP (2003)

Tujuan utama dari pembangunan manusia yaitu untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Hal tersebut tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebebasan memilih apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan menjalani hidup. Oleh karena itu, manusia harus bebas melakukan apa yang menjadi pilihannya dalam suatu sistem yang berfungsi dengan baik (*BPS, Bappenas, UNDP, 2001*).

6. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2000), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa,

ketiganya adalah : akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital dan kemajuan teknologi.

Kuznet dalam Susanti (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis Negara yang bersangkutan.

Teori Kasik juga membahas pertumbuhan ekonomi dengan penekanan pada akumulasi modal kapital yang dapat meningkatkan output. Asumsinya bahwa fleksibilitas harga dan upah akan menciptakan kesempatan kerja penuh. Model pertumbuhan klasik didasari oleh dua faktor utama yaitu : pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Adam Smith dalam Yunitasari (2007) mengatakan bahwa peningkatan output atau pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu peningkatan spesialisasi kerja, sistem pembagian kerja, dan penggunaan mesin untuk meningkatkan produktivitas. Apabila ketiga metode tersebut dilakukan, maka peningkatan akumulasi kapital akan terjadi.

B. Hubungan Antar Variabel dengan Indeks Pembangunan Manusia.

1. Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM

Menurut Midgley (1995), menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha

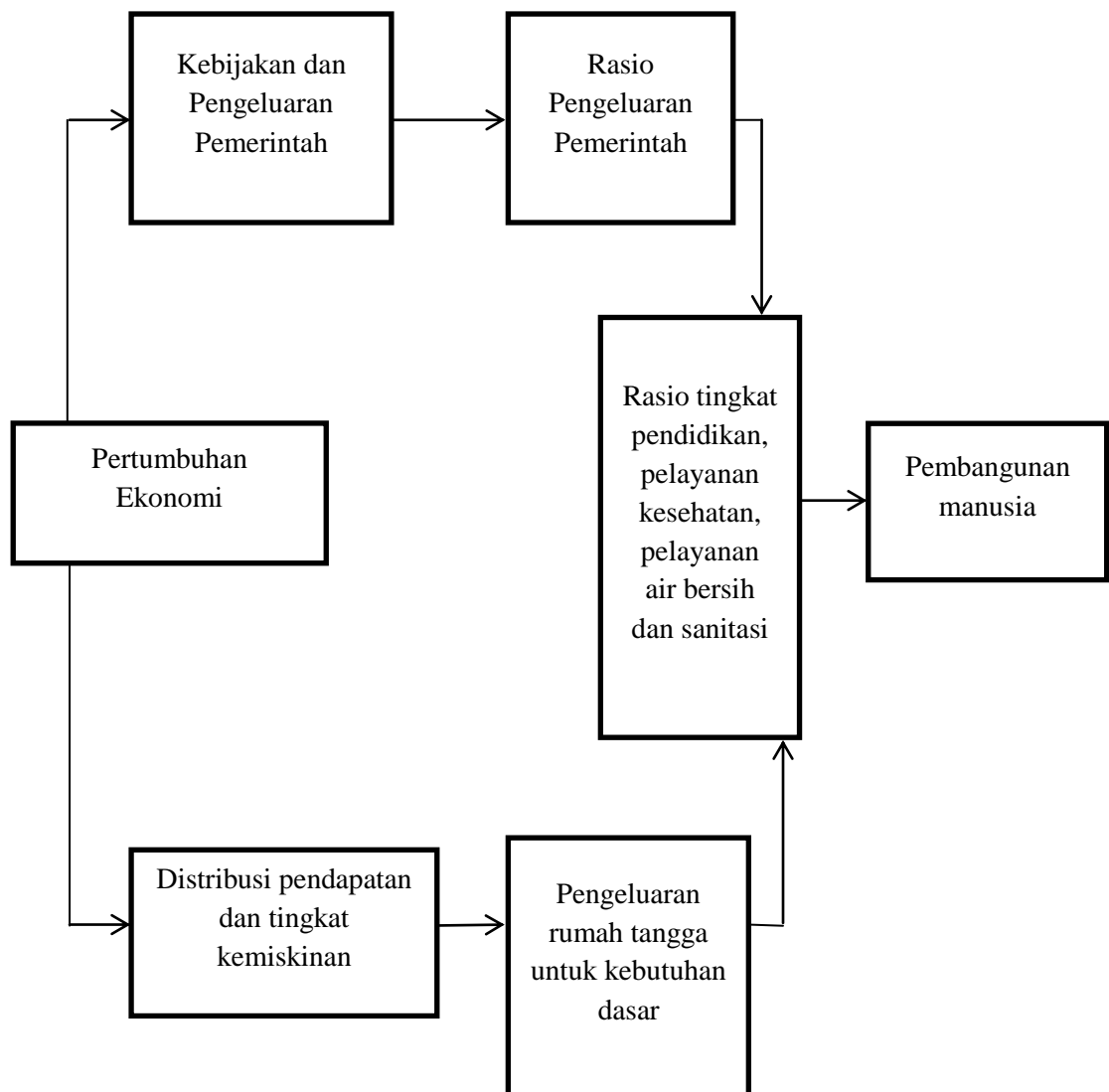
mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas.

Modal manusia (human capital) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi juga akan lebih baik. Menurut Todaro (2000), sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi dari bangsa yang bersangkutan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dijelaskan melalui 2 jalur seperti yang digambarkan pada Gambar 1. Jalur pertama adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk subsektor sosial yang terangkum dalam belanja modal. Besarnya pengeluaran tersebut besarnya pengeluaran tersebut mengindikasikan besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan manusia.

Jalur kedua adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggota keluarganya, biaya pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, serta untuk kegiatan lain yang

serupa. Selain pengeluaran pemerintah dan rumah tangga, hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena merupakan jembatan yang mengkaitkan antara keduanya (UNDP dalam Soebeno, 2006) dalam Mailendra 2009.



Sumber : Soebeno dalam Mailendra, 2009

Gambar 2.1

Alur Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pembangunan

Menurut teori Kuznet salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro, 2000).

Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output perkapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut dengan indikator pendapatan.

2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan IPM

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Model dalam pengeluaran pemerintah ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase

investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya (Dumairy,1997).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Dumairy, 1997).

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan (Mangkoesoebroto, 1994) dalam Devianti Patta, 2012)

Priambodo (2015) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia yang diwujudkan melalui peningkatan daya beli akan mendorong kenaikan permintaan produk kebutuhan rumah tangga lokal secara menyeluruh. Meningkatnya permintaan barang produk lokal akan memberikan ransangan yang besar kepada produsen lokal, memperbesar kesempatan kerja, dan menumbuhkan investasi. Kemudian struktur belanja APBD baik itu dari belanja modal, belanja pegawai, dan belanja daerah direalisasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik, dimana dari komponen belanja daerah tersebut terdapat salah satu faktor pembentuk IPM yang tentunya akan meningkatkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia.

Pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap pembangunan manusia juga disebutkan oleh Brata (dalam Ginting, 2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu determinan pembangunan manusia. Mardiasmo (dalam Christy, 2009) menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah pemerintah harus semakin mendekatkan diri pada pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan memegang peran penting guna meningkatkan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

3. Hubungan Jumlah Pnduduk Miskin dengan IPM

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hal dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan menurut PBB didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Todaro (2000) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Napitupulu (2007) dalam Cholili (2014) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan akan hidup panjang umur (longevity) dan hidup sehat (healty life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Lanjouw, dkk (2001)

menyatakan pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin asset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Menurut UNDP (1996) hubungan antara tingkat kemiskinan dan pembangunan manusia, yaitu banyaknya penduduk miskin turut mempengaruhi pembangunan manusia. Karena penduduk yang masuk kelompok ini, pada umumnya memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi mengalami hambatan. Akibatnya produktivitas menjadi rendah, pada gilirannya pendapatan yang diterima pun jauh dari cukup. Dampaknya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan mengalami kesulitan. Apalagi kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya menjadi terhambat. Implikasinya pada wilayah-wilayah yang terdapat banyak penduduk miskin, akan mengalami kesulitan untuk mencapai keberhasilan pada pembangunan manusianya.

Mirza (2012) juga menyatakan kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia dapat menjadi penyebab terjadinya penduduk miskin. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerjas berimbas pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dapat disimpulkan rendahnya pendapatan

akan menyebabkan tingginya kemiskinan. Semakin tinggi populasi penduduk miskin akan menekan tingkat pembangunan manusia, sebab penduduk miskin memiliki daya beli yang rendah.

C. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. Secara lengkap penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (th) dan Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Charisma Kurista Ginting S.(2008) “Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia”	Indeks Pembangunan Manusia, Kosumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan, Rasio penduduk miskin, Krisis Ekonomi	Menggunakan metode panel, dengan model Analisis <i>Random Effect</i> $IPM = x_0 + x_1 PRM + x_2 PRB + x_3 PPD + x_4 R + x_5 D + \epsilon_i$	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang antara konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan di Indonesia.
2	Muhammad Bakti Setiawan, Abdul Halim (2013) “Indeks Pembangunan Manusia Indonesia	Indeks Pembangunan Manusia, PDB, PPN, variabel dummy desentralisasi pemerintah, dummy krisis 1997 dan 2008	Menggunakan estimasi model ECM (<i>Error Correction Model</i>) $IPM = \beta_0 + \beta_1 PDB_t + \beta_2 PPN_t + \epsilon_t$	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB, PPN dan krisis ekonomi tahun 2008 signifikan mempengaruhi IPM. Sedangkan variabel desentralisasi pemerintahan dan krisis ekonomi tahun 1997 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM

3	Nur Isa Prawoto (2011) "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2002-2009"	Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Daerah, Gini Rasio, Proporsi Pengeluaran non Makanan, Ratio Ketergantungan	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel model efek acak (REM) $\text{Log(IPM}_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \log(\text{BD}_{it}) + \beta_2 \log(\text{GR}_{it}) + \beta_3 \log(\text{PNM}_{it}) + \beta_4 \log(\text{RK}_{it})$	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja daerah, proporsi pengeluaran non makanan dan rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel gini rasio memiliki pengaruh negative terhadap indeks pembangunan manusia.
4	Denni Sulitio Mirza (2012) "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009"	Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi, dan Belanja Modal	Model regresi data panel (<i>fixed effect model</i>) $\text{IPM}_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{KMS}_{it} + \beta_2 \text{GRWT}_{it} + \beta_3 \text{lnBMOD}_{it} + u_{it}$	Hasil penelitian menunjukkan menggunakan regresi panel menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
5	Devianti Patta (2012) "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode Tahun 2001-2010"	IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Menggunakan metode OLS (<i>Ordinary Least Square</i>) Model persamaan linear berganda (<i>multiple regression</i>) $Y = \ln \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln X_4 + \beta_5 X_5 + \mu$	Hasil penelitian ini bahwa pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM

6	Anugrah Priambodo (2015) “Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia” (studi pada kabupaten/kota di pulau Jawa 2007-2013)	Indeks Pembangunan Manusia, Kesejahteraan, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Belanja Pegawai.	Metode yang digunakan data panel FEM Model FEM pertama : $IPM_{it} = \beta_1 + \beta_2 \ln BD_{it} + \beta_3 PE_{it} + \mu_{it}$ Model FEM kedua : $IPM_{it} = \beta_1 + \beta_2 \ln BM_{it} + \beta_3 \ln BP_{it} + \mu_{it}$	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel terkait yaitu : belanja daerah, belanja pegawai, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charisma Ginting (2008) meneliti tentang “Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia” di 26 provinsi pada periode 1996, 1999, 2002, 2004, 2005 dan 2006. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis data panel dengan pendekatan metode *Random Effect*. Variabel yang digunakan dalam penelitiannya adalah konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi sebagai variabel Independent, sedangkan variabel dependennya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel konsumsi rumah tangga untuk makanan, rasio penduduk miskin, dan dummy menunjukkan pengaruh negatif terhadap IPM.

Setiawan dan Halim (2013) meneliti tentang “Indek Pembangunan Manusia Indonesia”. Metode analisis yang digunakan adalah ECM (Error

Correction Model). Variabel input yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, PPN, krisis ekonomi tahun 2008 dan 1997, serta desentralisasi fiskal sebagai variabel independent, sedangkan variabel dependennya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel PDB yang memiliki pengaruh positif karena peningkatan PDB akan memperbaiki kesejahteraan penduduk, variabel PPN memiliki pengaruh yang negatif terhadap IPM karena pajak yang ditarik oleh pemerintah secara tidak langsung akan mengurangi *disposable income*. Sedangkan variabel desentralisasi fiskal dan krisis ekonomi (2008 dan 1997) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM.

Nur Isa Prawoto (2011) meneliti tentang “Analisis Faktor- Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2002-2009”. Model analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi data panel model efek acak (REM). Variabel independent dalam penelitian ini adalah belanja daerah, gini rasio, proporsi pengeluaran non makanan, rasio ketergantungan dengan variabel dependent IPM. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel belanja daerah, gini rasio, proporsi pengeluaran non makanan, rasio ketergantungan baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Gini rasio berpengaruh negatif terhadap IPM, sedangkan belanja modal, proporsi pengeluaran non makanan dan rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Mirza (2012) meneliti tentang “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa

Tengah Tahun 2006-2009”. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah IPM dengan variabel independent yaitu : kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel dengan metode pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM.

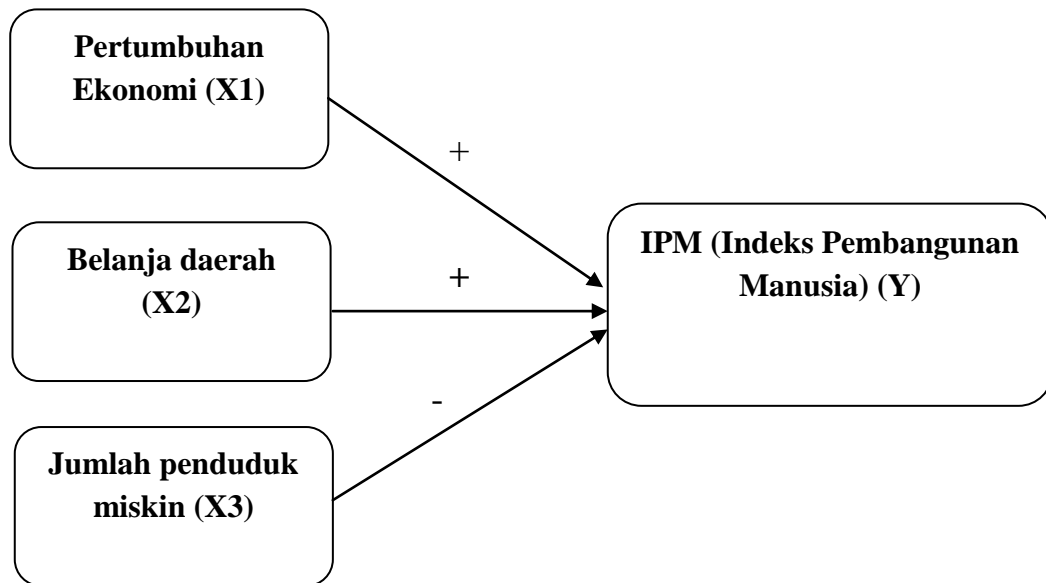
Devianti (2012) meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan ketimpangan distribusi pendapatan sebagai independent, sedangkan variabel dependennya adalah IPM. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis regresi linier berganda (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedang variabel persentase penduduk miskin, ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan.

Priambodo (2015) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013)”. Obyek penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri 110 kabupaten/kota di Pulau Jawa, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu : belanja daerah, belanja modal, belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi dengan variabel dependent IPM. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel menggunakan model pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja daerah, belanja modal, belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Pulau Jawa.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dalam melakukan penelitian mengenai IPM khususnya pada 33 Provinsi di Indonesia maka variabel yang akan di ukur, yaitu : pertumbuhan ekonomi, belanja daerah dan jumlah penduduk miskin. Alasannya dalam pemilihan variabel penelitian ini adalah berdasarkan penelitian sebelumnya. Oleh karena itulah dalam menguji pengaruh faktor (pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, dan jumlah penduduk miskin) terhadap IPM. Hal ini dapat dilihat dari kerangka pikir yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.2 Skema Penarikan hipotesis

E. Penurunan Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Diduga bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- H₂ : Diduga bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- H₃ : Diduga bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia